

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARWISATA KABUPATEN BANTUL
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 1638

TANGGAL 2 September 2019

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO	JENIS INFORMASI	BENTUK INFORMASI			WAJIB DIUMUMKAN SECARA			PENANGGUNG JAWAB
		Cetak	Soft Copy	On Line	Berkala	Serta Merta	Setiap saat	
1	Profil Dinas Pariwisata	V		V	V			Dinas Pariwisata
2	Ruang Lingkup Kegiatan	V		V	V			Dinas Pariwisata
3	Visi dan Misi	V		V	V			Dinas Pariwisata
4	Maksud dan Tujuan	V		V	V			Dinas Pariwisata
5	Fungsi Dan Tugas	V		V	V			Dinas Pariwisata
6	Gambaran Umum Setiap Satuan Kerja	V		V	V			Dinas Pariwisata
7	Profil Singkat pejabat struktural	V		V	V			Dinas Pariwisata
8	Nama program dan	V		V	V			Dinas Pariwisata

	kegiatan							
9	Target dan atau capaian program serta kegiatan	V		V	V			Dinas Pariwisata
10	Agenda terkait pelaksanaan badan publik	V		V	V			Dinas Pariwisata
11	Informasi tentang penerimaan calon pegawai badan publik	V		V	V			Dinas Pariwisata
12	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, yang sekurang kurangnya berisi :							
	1. Penilaian kinerja badan publik yang digambarkan dengan capaian dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut	V		V	V			Dinas Pariwisata

	1. Rencana dan laporan realisasi anggaran	V		V	V			Dinas Pariwisata
	2. Neraca	V		V	V			Dinas Pariwisata
	3. daftar asset dan investasi	V		V	V			Dinas Pariwisata
14	Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang kurangnya terdiri atas :							
	1. jumlah permintaan informasi yang diterima	V		V	V			Dinas Pariwisata
	2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi	V		V	V			Dinas Pariwisata
	3. jumlah permintaan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan yang ditolak	V		V	V			Dinas Pariwisata
	4. alasan penolakan	V		V	V			Dinas Pariwisata

	informasi							
15	Daftar Peraturan perundang-undangan,keputusan,dan kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	V		V	V			Dinas Pariwisata

Kepala Dinas Pariwisata 2



Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos
 Pembina Tingkat Utama I,IV/b
 NIP.19720413 199803 1008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PARIWISATA KABUPATEN BANTUL
 SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 1638
 TANGGAL 2 September 2019

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI BIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	Riwayat Kondisi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 1 UU no.14 Tahun 2008 tentang KIP 			
	a. Data pribadi pelamar umum pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 	Selama proses rekrutmen pegawai	Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga privasi • Melindungi dari penyalahgunaan data informasi yang bersangkutan
	b. Biodata Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama yang bersangkutan menjadi pegawai • Apabila 	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga privasi • Melindungi dari penyalahgunaan data informasi yang bersangkutan

		Negara	mendapat persetujuan yang bersangkutan		
2	Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 1 UU no.14 Tahun 2008 tentang KIP 			
	a. Hasil uji kesehatan pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • PP No.26 tahun 1977 tentang pengujian kesehatan PNS 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama yang bersangkutan menjadi pegawai • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan 	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia • Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmatisasi
	b. Hasil rekomendasi tes psikologi, bimbingan konseling	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Ka BKN No.11 tahun 2008 pedoman penilaian kompetensi PNS 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama yang bersangkutan menjadi pegawai • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan 	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia
	c. Hasil rekomendasi tes psikologi, bimbingan konseling	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Ka BKN No.11 tahun 2008 pedoman 	Selama yang bersangkutan menjadi pegawai	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja

		penilaian kompetensi PNS			
3	Kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 1 UU no.14 Tahun 2008 tentang KIP 			
	a. Laporan keuangan yang belum diaudit	Kepmendagri tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah	Sampai selesai diaudit	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak terekspos
	b. Kode PIN rekening bank pegawai	UU No.11 tahun 2008 tentang ITE pasal 1 angka 6	Selama kode masih digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening bank
4	Hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 1 UU no.14 Tahun 2008 tentang KIP 			
	a. Daftar nilai DP3 pegawai	PP No.10 tahun 1979 tentang penilaian	Selama 3 periode penilaian	Mengungkap data PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

		pelaksanaan pekerjaan PNS pasal 6			
	b. Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	PP No.9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai	Sampai diterbitkannya SK	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
	c. Data usulan pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	PP No.13 tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Sampai sumpah terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
5	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode (X) Sangat Rahasia (SR) dan Rahasia (R)	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Gubernur DIY No.30 Th 2011 tentang tata naskah dinas di Prov.DIY Permendagri No.54 Th 2009 tentang tata 	Hingga proses surat tersebut selesai	<ul style="list-style-type: none"> Menghambat kebijakan Pimpinan Merugiakan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa

		naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah			
6	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Perpres No.54 Th 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pasal 66 • Perpres No.70 Th 2012 tentang pengadaan barang dan jasa 	Selama proses pengadaan barang/jasa	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
7	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Perpres No.54 Th 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pasal 66 • Perpres No.70 Th 2012 tentang pengadaan 	Selama proses pengadaan barang/jasa	Muncul persaingan tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian

		barang dan jasa			
8	Kode Akses elektronik aplikasi	UU No.11 tahun 2008 tentang ITE pasal 1 angka 6	Selama kode masih digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia
9	Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan UU	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 1 UU no.14 Tahun 2008 tentang KIP 	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai alasan yang tersurat/tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai alasan yang tersurat/tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
10	SPJ, SPM, SPP, SP2D	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.17 Th 2003 tentang keuangan negara • UU No.1 Th 2004 tentang perbendaharaan negara 	Masa pelaksanaan pekerjaan	Mengungkap data ketidakwajaran	Menjaga kerahasiaan pembelanjaan

Kepala Dinas Pariwisata 2



Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos
Pembina Tingkat Utama I,IV/b
NIP.19720413 199803 1008